

BAB II

HUBUNGAN AUSTRALIA-INDONESIA SEBELUM MASA PEMERINTAHAN JOHN HOWARD

A. Hubungan Diplomatik Antara Australia-Indonesia Pada Masa Paul Keating

Dalam perjalanan politik luar negeri Indonesia dan penyelenggaraan hubungan luar negeri sesungguhnya telah banyak hal yang dilakukan dan dicapai dengan baik. Penumbuhan penguatan citra Indonesia sebagai negara yang mampu memadukan dinamika penduduk yang mayoritas beragama Islam dan demokrasi, perhatian yang sangat serius terhadap persatuan dan kesatuan nasional, penegakan hukum dan penghormatan hak asasi manusia (HAM) yang tidak diskriminatif, pendorongan pemulihan ekonomi yang lebih menjanjikan serta perlindungan warga negara yang konsisten, merupakan dasar-dasar kebijakan yang terus dikembangkan.¹

Seluruh pencapaian itu sesungguhnya menjadi aset penting bagi pelaksanaan politik luar negeri dan penyelenggaraan hubungan luar negeri Indonesia.² Di samping itu, kedudukan geo-politik yang strategis dengan kekayaan sumber daya alam (SDA), populasi, proses demokratisasi yang semakin baik merupakan kekuatan dan keunggulan komparatif sebagai potensi untuk membangun kepemimpinan Indonesia di tataran global melalui inisiatif dan kontribusi pemikiran komitmen Indonesia pada

¹ Rien Kuntari. *Timor-Timur Satu Menit Terakhir*. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2008, hlm. 407.

² M.A. Muthalib dan Mohd. Akbar Ali Khan. *Theory of Local Government*, New Delhi: Starling Publisher Private Limited, 1982, hlm. 5.

terbentuknya tatanan hubungan internasional yang lebih adil dan berimbang. Paul Keating Lahir di Bankstown, New South Wales, Paul Keating adalah anak tertua dari empat bersaudara. Paul Keating berasal dari Irlandia tradisional, kelas pekerja, sentimental dan emosional. Paul Keating seorang yang beragama Katolik, ia juga selalu mengerjakan tiga hal: rajin ke gereja, bergabung dengan serikat pekerja, dan mendukung Partai Buruh. Ayahnya yang bernama Matt Keating, bekerja sebagai buruh pabrik ketel, ia mendapatkan semangat kesadaran berpolitik. Dan ibunya bernama Min Keating, dimana Paul Keating ia mewarisi sikap religius ibunya.³

Paul Keating, pada usia 12 tahun, sudah mulai bekerja dengan Partai Buruh sebagai penyebar pamflet. Sikap politik ini sudah ditanamkan ayahnya sejak dini. Ayahnya juga salah seorang yang lebih percaya bahwa sukses bisa diraih dengan kerja keras ketimbang lewat pendidikan tinggi. Paul Keating sendiri masuk sekolah Katolik La Salle College hingga berusia 15 tahun, Paul Keating sudah sering bekerja di toko mencari uang pada masa liburan sekolah.

Paul Keating yang saat itu masih muda tentu saja tak menyembunyikan sifat remajanya. Ia kagum pada mobil dan musik rock 'n' roll. Pada saat itu pula Keating dikenal sebagai anak muda yang selalu perlente. Ia selalu mengenakan setelan jas rapi, rambutnya tersisir rapi dan sepatunya disemir mengkilat. ketika sudah menjadi politikus terkenal, setiap kali diwawancarai televisi, Keating selalu membawa beberapa setel jas. Ia bersikeras untuk mengadakan tes di depan kamera untuk

³ *Kompas* 20 Februari 1995, hlm. 1-3.

menentukan jas mana yang paling cocok dikenakan di televisi. Ketika berusia 18 tahun, Keating bergabung dengan *Labor Youth Council* (Dewan Pemuda Partai Buruh).⁴ Melalui LYC, Keating belajar berargumentasi politik, mengenal berbagai masalah ekonomi dan politik. Partai Buruh saat itu melihat LYC sebagai wadah kaderisasi politikusnya. Pada tahun 1965, Paul Keating bekerja di berbagai perusahaan asing dan ketika berusia 21 tahun, kehidupannya mulai diabdikan sepenuhnya untuk politik. Ia mendaftarkan diri dalam praseleksi parlemen federal dan seleksi itu dilaluinya dengan mudah. Pada usia 25 tahun, Keating menjadi anggota termuda di parlemen negara bagian New South Wales.

Tahun pertama bagi Paul Keating, adalah tahun untuk mencari dan mengenal parlemen. Bahasa dan kata-katanya sering mengejutkan lawan politiknya. Perdebatan di parlemen sering diakhiri dengan kemenangan Keating. Dan karier politiknya melesat dengan cepat ketika ia meraih jabatan ketua Partai Buruh cabang New South Wales tahun 1979. Walau usia masih muda, Keating dianggap sebagai politikus yang konservatif.

Paul Keating pernah melontarkan keprihatinannya atas wanita yang harus bekerja di luar rumah untuk menambah nafkah suaminya. Paul Keating bercita-cita untuk memperbaiki keadaan ini. Seorang wanita, katanya, seharusnya seorang istri, tak perlu bekerja di luar rumah. Cita-citanya itu diterapkan di keluarganya. Australia pada pemilu sebelumnya, kemenangan seorang kandidat PM ditentukan oleh citra

⁴ *Kompas* 15 April, hlm. 2.

pribadinya yaitu kekukuhan partai dan taktik kampanye. Rakyat Australia akan menentukan pilihannya atas dasar kuat atau lemahnya pribadi calon pemimpin mereka serta kinerja partai baik dari segi pemerintahan maupun oposisi. Dilihat dari sisi pemerintahan di pemerintahan, adanya kelemahan Partai Buruh adalah ia berkuasa selama 13 tahun.

Rakyat Australia biasanya akan mengganti pemerintah yang telah lama berkuasa serta akan menggantinya dengan yang baru. Partai Buruh di dukung oleh para ahli strategi kampanye serta kukuhnya dua serangkai, Paul Keating, Deputi PM Kim Beazley yang merupakan pemenang tim. Paul Keating seseorang yang berasal dari Sydney ia menjadi anggota perlemen lebih dari 25 tahun. Paul Keating adalah anak dari golongan pekerja, tetapi ia lebih memahami kelompok berpendapatn rendah dan kesulitan hidup rakyat Australia yang berada di daerah kumuh perkotaan. Keunggulan Paul Keating, yaitu menjadi anggota parlemen mewakili Blaxland pada tahun 1969.⁵

Paul Keating pertama kali menjadi Bendahara negara pada tahun 1983 di usia 39 tahun. Kekuatan Paul Keating sebelum menjadi PM, ia adalah Bendahara Negara masa pemerintahan Bob Hawke tahun 1983-1991 yang memiliki visi jauh kedepan. Dan terlihat dari upaya Pemerintah Buruh untuk menswastakan perusahaan-perusahaan Negara seperti Telkom dan Qantas yang melakukan deregulasi ekonomi sektor perbankan. Ekonomi Australia mengintegrasikan ekonomi Australia dengan

⁵ *Ibid*, hlm. 1.

ekonomi Asia yang berkembang pesat, serta menciptakan kerjasama ekonomi Asia Pasifik (APEC). Paul Keating juga berada di belakang kebijakan *The Accord* dan *The Accord Mark II*, yaitu pengaturan penentuan gaji atau upah minimum para pekerja yang telah diatur antara pengusaha dan serikat buruh. Pengaturan yang di berlakukan ini di tentukan oleh dasar pengalaman kerja dan tingkat pendidikan para buruh, apakah mereka itu *Blue Colour* (Buruh Kasar) atau *White Colour* (Buruh Berdasi). Sebagai Perdana Menteri Paul Keating merupak ekonom yang dibesarkan oleh pengalaman serta berkarir dalam berbagai organisasi buruh dan pemerintahan.⁶

Paul keating berupaya keras memperkuat ekonomi Australia dalam menyongsong perdagangan bebas Asia Pasifik pada 2020. Keunggulan sosok pribadi yang dimiliki oleh Paul Keating juga ditunjang oleh keadaan ekonomi Australia saat ini lebih baik dari pada pemilu pada tahun 1993. Sebagai contoh pada saat pemilu 1993, angka pengangguran mecapai 11,3%, sedangkan saat ini hanya 8,6%. Pertumbuhan ekonomi pada 1995 mencapai 3,5% sedangkan inflansi hanya sekitas 5%.

Hal utama yang sangat membuat malu Pemerintah Buruh adalah adanya deficit neraca yang berjalan sekitar 1,48 milyar dollar Amerika serta hutang liar negeri sebanyak 121,8 milyar dollar. Paul Keating bukan saja seorang ekonom, tetapi juga seorang Diplomat yang unggul dalam meningkatkan citra Australia di Asia. Paul

⁶ Benyamin Hoessein, "Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan sebagai Tanggap terhadap Aspirasi Kemajemukan Masyarakat dan Tantangan Globalisasi", (Jurnal *Usahawan*, No. 04 Tahun XXIX, April 2000), hlm. 11.

Keating berhasil meluluhkan hati para pemimpin ASEAN, yang pada khususnya dalam mempererat hubungan pribadinya dengan Presiden Soeharto yang mengakibatkan segala persoalan yang menyangkut hubungan bilateral Australia-Indonesia bisa diselesaikan secara baik, seperti soal pengangkatan Dubes RI, masalah HAM di Indonesia dan masalah Timor-Timur.

Australia-Indonesia juga telah menandatangani kerja sama keamanan pada Desember 1995. Hubungan diplomatik antara Australia-Indonesia di bawah kepemimpinan Paul Keating berjalan baik dapat dikatakan sangat dekat, bukan tidak mungkin akan menjadi tanda Tanya, jika kelompok oposisi dalam pemilu Australia masa yang akan datang memperoleh kemenangan.

Hubungan Australia-Indonesia terutama ditunjang oleh kedekatan hubungan antara Paul Keating dan Presiden Soeharto. Menlu Ali Alatas dan Gareth Evans. Respon Paul Keating terhadap kepemimpinan Presiden Soeharto juga sering digambarkan sebagai hubungan bapak terhadap anak.

Paul Keating mengatasi persoalan Timor-Timur dan isu hak asasi manusia yang pada waktu itu muncul dari kelompok-kelompok yang kontra Indonesia serta dari Partai Buruh selama ini telah terbukti menjalankan tugasnya dengan baik sehingga hubungan Australia-Indonesia tetap berjalan baik.⁷ Australia-Indonesia dilihat dalam hubungan sudah cukup baik dan dekat, tetapi hubungan demikian belum terwujud yaitu dalam segi kerjasama ekonomi. Sampai saat ini, Indonesia masih

⁷ Benyamin, *loc.cit.*

merupakan mitra dagang Australia pada urutan kesepuluh, sementara bagi Indonesia. Adanya persoalan justru disinilah ada letak persoalan kesan yang muncul adalah masih terbatasnya kedekatan hubungan pada tingkat politis, yang pada akhirnya memunculkan kesan eletis. Sejauhnya ini nampaknya tidak adanya tokoh dari kubu oposisi yang akan menerapkan prinsip yang sama dengan yang diterapkan oleh Paul Keating.

Diperkirakan pada saat kelompok oposisi mengambil alih kendali pemerintahan Australia, adanya suara-suara yang kontra Indonesia, termasuk yang berasal dari Partai Buruh akan kembali menguat. Pada titik inilah para pengambil keputusan dan terutama para Diplomat Indonesia yang terlihat langsung dalam interaksi hubungan kedua Negara sehingga dapat mengantisipasi apa yang akan terjadi.⁸

Paul Keating pada saat kunjungannya ke Indonesia adalah merupakan lompatan pertama dari "diplomasi kanguru" setelah menduduki kursi kepala pemerintahan. Memberikan prioritas Indonesia sebagai negara pertama yang dikunjungi tampaknya bisa diartikan bahwa Australia akan membuka babak baru dalam politik luar negeri. Paul Keating bahkan sudah mencalonkan di depan Presiden George Bush dan Ratu Elizabeth, yang mengunjunginya beberapa hari setelah pelantikan, bahwa Australia tidak lagi berkiblat ke Inggris. Australia akan lebih

⁸ *Kompas* 10 Februari 1998, hlm. 1.

mandiri dan mendekati ke Asia. Bahkan ada yang menyebut, Australia di masa depan akan menjadi "Asia Putih".

Kunjungannya di Jakarta ini, kecuali menyaksikan penandatanganan beberapa persetujuan kerja sama, seperti pajak berganda, perikanan, dan ekstradisi, Paul Keating, mengaku ingin belajar dari Pak Harto, yang dianggapnya sebagai negarawan senior. Paul Keating juga akan melontarkan idenya memantapkan kerja sama antar negara Asia Pasifik. Bahkan kalau disepakati, Australia siap menjadi motor untuk suatu konperensi tingkat tinggi (KTT) Asia Pasifik itu, yang berarti bisa mengangkat citranya sebagai negarawan terkemuka.⁹

Indonesia sendiri masih melihat ada beberapa masalah yang perlu dibereskan untuk mengangkat kerja sama Asia Pasifik lebih jauh dari sekadar kerja sama ekonomi tingkat menteri seperti sekarang. Namun, apa pun yang dibicarakan Paul Keating selama di Jakarta tentunya tak lepas dari hubungan bilateral kedua negara yang sering mengalami pasang surut di masa lalu. Ketegangan hubungan kedua negara, misalnya.

Indonesia sendiri masih melihat ada beberapa masalah yang perlu diselesaikan untuk mengangkat kerja sama Asia Pasifik lebih jauh dari sekadar kerja sama ekonomi. Paul Keating selama di Jakarta tentunya tak lepas dari hubungan bilateral kedua negara yang sering mengalami pasang surut di masa lalu. Ketegangan

⁹ *Ibid*,

hubungan kedua negara, misalnya, di akhir tahun lalu sehubungan dengan Insiden Dili 12 November 1991 ketika Bob Hawke masih memimpin Australia.¹⁰

Bantuan untuk pembangunan Timor-Timur bahkan diberikan. Namun, hubungan kedua negara sekarang ini tentunya tak terlepas dari pasang surut hubungan kedua negara tetangga itu di masa lalu. Bahkan kedua negara telah merumuskan perjanjian Celah Timor, yang menunjukkan bahwa Australia tidak mempersoalkan lagi integrasi Timor-Timur ke dalam wilayah Indonesia. Di masa lalu memang ada beberapa kerikil yang mengganggu kenyamanan hubungan kedua negara. Kecuali permainan politik di dalam negeri, pers Australia juga mempunyai andil yang cukup besar dalam hubungan Australia-Indonesia.¹¹

Kebijakan suatu negara pada umumnya merupakan reaksi yang terjadi akibat interaksi antarnegara mengenai satu peristiwa tertentu yang terjadi. Berbagai perkembangan yang menyebabkan serta bisa menimbulkan perubahan arah kebijakan. Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, kita belajar dari fluktuasi hubungan Indonesia dan Australia yang mana setiap pemegang pemerintahan tertinggi membawa karakteristik arah diplomasi politik yang berbeda.

Menteri luar negeri Indonesia dan presidennya sanggup berinteraksi secara kooperatif dengan perdana menteri Australia, maka terdapat kecenderungan keduanya bisa meredakan ketegangan bahkan sebaliknya menciptakan kerjasama dan kesepakatan pada akhirnya. Begitu pula sebaliknya, jika kedua pihak membawa sikap

¹⁰ *Kompas* 8 Februari 1995, hlm. 1.

¹¹ *Kompas* 10 Februari 1995, hlm.2.

ofensif dan saling kritik tanpa adanya niat untuk menjalin kepastian, maka yang terjadi adalah ketegangan. Peristiwa dan isu domestik berpotensi besar mengundang kritikan dari masyarakat internasional, tentu saja itu dikarenakan Indonesia selalu berdekatan dengan negara lain. Selain itu, belajar dari hubungan Indonesia dan Australia, kita mengetahui bahwa pers (media dan informasi) bisa bertransformasi menjadi batu sandungan hubungan bilateral.¹² Oleh karena itu, penting sekali bagi *decision maker* untuk mempelajari isu pers secara lebih intensif sebelum membekukan secara sepihak hubungan diplomatik.

Dari berbagai pergolakan politik di timur tengah, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa di tengah konflik internal suatu negara, asas non-intervensi mesti diletakkan sebagai prioritas fundamental membangun sikap hati-hati agar tidak dengan mudah terperosok pada konflik yang sudah terjadi. Selain itu, posisi yang mungkin dimiliki oleh negara lain terhadap Indonesia juga menjadi pertimbangan utama menentukan sikap politik agar tidak memperparah kondisi dan situasi, misalnya perang Teluk I yang melibatkan Irak Indonesia mesti mempertimbangkan posisi dan partisipasi politik Irak sebagai sesama gerakan Non-Blok.¹³

Tekanan internasional yang tinggi dan lemahnya legitimasi politik terhadap Habibie memang sangat mempengaruhi perubahan kebijakan terhadap Timor-Timur, terlihat dari tekanan-tekanan yang dilakukan oleh AS dan Australia, serta IMF dan

¹² *Kompas* 9 Februari 1995, hlm. 3.

¹³ Susan Crithley. *Hubungan Australia dengan Indonesia*. Universitas Indonesia: UI Press, 1995, hlm. 181-186.

Bank Dunia, membuat Habibie dengan alasan mendapatkan bantuan ekonomi, mengeluarkan kebijakan referendum terhadap Timor-Timur. Lemahnya legitimasi publik Indonesia terhadap Habibie, terutama dari pihak militer, aktivis dan pelajar, membuat kebijakan Habibie mendapat simpati yang rendah, terutama banyak rakyat yang menyesali lepasnya Timor-Timur dari tangan Indonesia, yang telah lama menjadi bagian integrasi Indonesia selama 23 tahun.

Demokratisasi dan perubahan politik mendalam terus berlangsung di semua aspek sosial-politik di Indonesia. Perubahan tersebut bahkan menyentuh bidang diplomasi dan politik luar negeri yang selama ini dianggap murni merupakan kewenangan penuh pihak eksekutif (pada era Orde Baru).¹⁴

Kebijakan diplomasi dan politik luar negeri yang melibatkan semakin banyak aktor akan membuka kemungkinan bahwa setiap kebijakan dalam dua bidang tersebut akan merepresentasikan kepentingan nasional secara lebih luas dan komprehensif. Sementara itu, kritik terhadap politik luar negeri sebuah pemerintahan transisi adalah hal yang umum terjadi. Partai oposisi atau kelompok kepentingan lainnya, akan selalu menjadikan politik luar negeri sebagai target karena politik luar negeri merupakan sesuatu yang proses perumusannya dilihat sebagai monopoli pemerintah yang berkuasa.

¹⁴ D.Murphy dan J.McBeth. *Scorched Earth: East Timor*. Far Eastern Economic Review, 162, 1999, hlm. 10-14.

Negara demokratis di luar negeri dapat memberi sumbangan positif bagi proses konsolidasi demokrasi di dalam negeri. Indonesia berkepentingan untuk menciptakan lingkungan eksternal yang kondusif bagi proses konsolidasi tersebut. Menciptakan kawasan Asia Tenggara sebagai kawasan “tetangga” yang dihuni negara-negara yang demokratis seharusnya menjadi tujuan politik luar negeri Indonesia saat ini.

Demokratisnya kawasan Asia Tenggara akan turut mempengaruhi situasi politik di Indonesia. Bila di zaman Orde Baru terbentuk pemerintahan tertutup di hampir sebagian besar negara anggota ASEAN karena adanya *like-minded authoritarian leaders*, termasuk pemerintahan Soeharto di Indonesia, tiba waktunya untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang dipimpin oleh *like-minded democratic leaders* demi kepentingan dan tujuan membangun nilai demokrasi yang lebih kuat di Indonesia.¹⁵

B. Kerjasama dalam Bidang Keamanan antara Australia-Indonesia

Kebijakan pertahanan Australia mata rantai yang tidak dapat terpisahkan dari kebijakan domestik Luar Negeri serta ekonomi. Seperti kebijakan Luar Negeri kebijakan pertahanan Australia di dominasi oleh eksekutif. Dalam pembuatan kebijakan pertahanan terdapat kabinet mengenai politik luar negeri dan perdagangan. Departemen pertahanan Australia yang merupakan kombinasi antara kelompok sipil

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 30.

dan militer yang memiliki tanggung jawab penuh dalam menentukan kebijakan pertahanan Australia.¹⁶

Satu hal yang menarik adalah buku putih pertahanan Australia, meskipun dikeluarkan oleh departemen pertahanan. Fungsi pasukan perdamaian adalah untuk menjaga perdamaian, dan pada akhirnya Australia mengakui tidak ada gunanya mengirimkan pasukan perdamaian ke Timor-Timur jika tidak ada suatu kondisi perdamaian yang kondusif.

Pemerintah Australia menganalisis bahwa ada dua hal yang melibatkan bila ABRI ditarik secepatnya dari Timor-Timur. Pertama, adanya kekerasan yang sifatnya balas dendam antara warga di Timor-Timur. Kedua, kekerasan yang terjadi antar kelompok-kelompok di Timor-Timur dan mempunyai persenjataan sendiri. Ini akan menimbulkan suatu kekerasan yang terjadi. Pemerintah Australia yakin perang saudara dapat dihindari di Timor-Timur, tetapi ini akan memerlukan bantuan semua pihak yang bersangkutan.¹⁷

Pemerintah Australia-Indonesia dan pemerintah Australia dalam pertemuan tingkat menteri di Bali 23-25 Februari 1999, antara lain membahas persoalan Timor-Timur, terutama yang menyangkut perpajakan. Pada tahun 1996 Australia dan Indonesia membuat Perjanjian Pertahanan Keamanan. Perjanjian tersebut dibuat karena kedua negara ingin memperkuat persahabatan yang ada di antara keduanya. Perjanjian itu juga mengakui pentingnya jaminan perdamaian dan stabilitas kawasan

¹⁶ *Kompas* 23 Februari 1999, hlm. 1-2.

¹⁷ *Kompas* 24 Februari 1999, hlm. 2.

sebagai cara untuk menjamin adanya pembangunan ekonomi dan kesejahteraan bagi kedua negara. Kedua negara menyepakati bahwa:

1. Para menteri negara akan secara tetap berkonsultasi mengenai masalah-masalah keamanan.
2. Mereka akan saling berkonsultasi jika terjadi tantangan yang sifatnya bermusuhan terhadap kepentingan keamanan .
3. Mempertimbangkan tindakan individual atau tindakan bersama yang mungkin diambil.
4. Bekerjasama dalam masalah-masalah keamanan.

Perjanjian ini tidak berlaku terhadap komitmen internasional yang ada pada kedua negara. Perjanjian itu juga didasarkan atas kesepakatan mengenai perlunya menghormati kedaulatan, kemandirian politik, dan integritas kawasan bagi semua Negara Australia-Indonesia mengadakan pertemuan AIMF dan AIDA. Sebelum diadakannya pertemuan itu pertemuan itu didahului dengan pertemuan Indonesia-*Australia Bisnic Council* (IABC), yang akan di hadiri pengusaha-pengusaha dari kedua Negara, dengan tujuan meningkatkan hubungan ekonomi, yaitu terutama dalam memulihkan perekonomian.¹⁸

¹⁸ Martin O' Hare and Anthony Reid. *Australia and Indonesia's Struggle For Independence*, Jakarta: PT Gramedia Puataka Utama, 1995. hlm. 17.

Pertemuan Dewan Menteri di Timor-Timur akan dilakukan secara terpisah pada hari terakhir. Dalam pertemuan ini perwakilan dari Indonesia dipimpin oleh Menteri Pertambangan dan Energi Kuntoro Mangkusubroto, dan Australia diwakili oleh Menteri Industri, Ilmu Pengetahuan dan Sumber Daya, senator Nick Minchin. Landasan utama kerjasama ini, adalah perjanjian antara ke dua belah Negara pada tingkat kerjasama antara provinsi Timor-Timur dan Australia Utara yang ditandatangani 11 Desember 1989 dan berlaku pada tanggal 9 Desember 1991.

Politik luar negeri Paul Keating ini membuat hubungan antara Australia dengan Indonesia menjadi lebih baik. tetapi setelah naiknya Howard yang mengubah politik luar negerinya dengan pengakuan kemerdekaan Timor-Timur, maka hubungan tersebut menjadi tegang.¹⁹ Kondisi yang demikian mengisyaratkan bahwa Australia seharusnya dapat menjalin hubungan baik terutama dengan Indonesia sebagai negara tetangga terdekat di utara. pandangan pemikiran yang perlu disikapi oleh pemerintah Indonesia terhadap hubungan kedua negara adalah sebagai berikut:

1. Revolusi diplomasi dalam memandang Australia sebagai negara tetangga.
2. Wacana politik yang elegan tanpa membuat takut Australia seperti misalnya mengembangkan politik kebudayaan yang tidak terkait dengan ekspansi ekonomi.

¹⁹ *Ibid*,

3. Mengubah paradigma baru membangun wacana nasionalisme Indonesia dengan mengedepankan diplomasi yang agresif untuk kepentingan nasional.

Dari sisi Australia, perlu dikembangkan arah kebijakan politik luar negeri yang seimbang antara kedekatannya dengan Amerika Serikat (*western*) dengan kesadaran bahwa negara-negara di Asia telah bangun dan menjadi kekuatan yang tidak terbendung, seperti Cina, India, dan Korea. Bagi Australia, membangun hubungan Australia-Indonesia yang lebih kuat dapat dibangun melalui perbaikan hubungan Australia-Indonesia secara lebih keras.²⁰

Membangun kapasitas kompetensi perdagangan dan investasi skala internasional dengan penekanan pada pasar Asia Pasifik, dapat dijelaskan bahwa pandangan politik luar negeri Australia masa kepemimpinan John Howard cenderung mengedepankan pihak swasta sebagai kekuatan terdepan dalam diplomasi internasional.

Australia dalam penampilan di dunia internasional memperlihatkan dirinya sebagai wakil kepentingan kolonialisme baru di belahan Asia Tenggara. Demokrasi di Australia adalah memisahkan antara apa yang menjadi kawasan swasta dari kawasan pemerintah. Wajah politik luar negeri Australia dapat sama sekali berbeda dengan wajah politik swastanya. Dengan dalih swasta, pemerintah Australia dapat melepaskan diri dari tuduhan merongrong negara lain (simak peristiwa lepasnya

²⁰ Martin, *loc.cit.*

Timor-Timur, yang didahului dengan merebaknya peran LSM yang mengangkat isu kemanusiaan).

Peran swasta menjadi garda depan diplomasi yang sangat efektif untuk memperjuangkan agenda-agenda politik sebuah negara. Melalui peran pihak swasta inilah Australia berupaya mengembangkan dirinya sebagai investor dan pelaku perdagangan skala dunia. Tidak dapat dipungkiri bahwa pada saat ini Australia menjadi negara salah satu negara terkaya di dunia. Penahanan laju konflik regional memperlihatkan peran serta Australia terhadap kepentingan perdamaian dunia.²¹

Penghapusan senjata pemusnah massal, penurunan kualitas lingkungan, peredaran narkoba dalam jaringan internasional, dan kejahatan transnasional, semuanya menjadi agenda kepedulian Australia terhadap masalah-masalah yang timbul di dunia.

Dapat disimpulkan bahwa keterlibatan Australia tidak hanya pada masalah kekuatan militer dan ekonomi, tetapi juga masalah-masalah lain di luar keduanya. Tindak lanjut dari persoalan Australia harus mampu mempromosikan dirinya sebagai negara yang memiliki nilai demokrasi liberal (yang memang direfleksikan dari budaya Eropa), dan harus pula dapat mengupayakan dirinya agar dapat menarik minat negara-negara sekitar yang memiliki budaya berbeda.²²

Artinya Di satu sisi Australia harus memperlihatkan jati dirinya sebagai negara dengan pola pikir dan budaya putih, tetapi di sisi lain Australia juga harus mampu

²¹ *Kompas* 5 Februari 1997, hlm. 3.

²² *Kompas* 15 Februari 1997, hlm. 2.

menempatkan dirinya yang berbeda tersebut dalam lingkungan Asia Tenggara-Pasifik yang bukan berbudaya putih. Di lihat pada masa pemerintahan Howard tersebut, tampaknya masih relevan dengan tiga pilar politik luar negeri Australia.

Warna partai Liberal yang konservatif memang terlihat sangat kuat, seperti ketegangan-ketegangan yang muncul akibat sering terjadi kekeliruan dalam persepsi antara pemerintah Australia dengan Indonesia, tetapi juga tradisi penekanan pada pentingnya wilayah regional dan kerjasama dengan negara-negara Asia menjadi salah satu agenda politik luar negeri Australia. Di samping itu, pilar kedua yang merupakan tradisi partai Buruh, juga sedikit terlihat yakni pemahaman terhadap identitas diri suatu bangsa. Pertanyaan yang masih perlu dikemukakan adalah, serta bagaimana arah politik luar negeri Australia masa mendatang.²³

²³ *Kompas* 6 Februari 1997. hlm. 1-3.